

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI VERIFIKASI PPK
SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO)**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI VERIFIKASI PPK SKPD
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Sawahlunto)**

Oleh
MASDIANA

Dibawah Bimbingan :

(Dr.Suhairi,M.Si.Ak dan Drs.Masrizal.M.Soc.Sc)



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi verifikasi PPK SKPD atas pertanggungjawaban bendahara berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PPK SKPD dalam melaksanakan fungsi verifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif (observasi yang pasif), yaitu pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto tempat dimana peneliti sehari-hari bekerja. Wawancara dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama wawancara dengan lima orang PPK SKPD dan tahap kedua wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Sawahlunto, Kepala Bidang Perbendaharaan serta Kepala Seksi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kota Sawahlunto. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan fungsi verifikasi dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi verifikasi PPK SKPD atas pertanggungjawaban bendahara belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PPK SKPD seperti: (i) belum melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. (ii) Adanya duplikasi pelaksanaan fungsi verifikasi dengan PPKD. (iii) Temuan/rekomendasi verifikasi tidak didokumentasikan dan diarsipkan oleh PPK SKPD. Kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi verifikasi yaitu: (i) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan daerah lainnya tidak memberikan pedoman yang jelas dan rinci terkait pelaksanaan fungsi verifikasi atas pertanggungjawaban bendahara. (ii) Kurangnya pembinaan PPKD terkait pelaksanaan fungsi verifikasi, sehingga PPK SKPD melaksanakan fungsi verifikasi berdasarkan pengalaman.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban, Fungsi Verifikasi

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION VERIFICATION FUNCTIONS
OF PPK SKPD BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF
HOME AFFAIRS NUMBER 13 YEAR 2006 REGARDING GUIDELINES ON
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT (CASE STUDY ON
SAWAHLUNTO MUNICIPAL GOVERNMENT)

By :
MASDIANA

Under the Supervision of:
(Dr.Suhairi,M.Si.Ak dan Drs.Masrizal.M.Soc.Sc)

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the function verification of PPK SKPD on the accountability of treasurer based on The Regulation of The Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006 and to know the obstacles faced by PPK SKPD in performing the verification function. This research is a qualitative research with descriptive approach. Data collection techniques are observation, interview and documentation. Observations made are participatory observation (passive observation), Namely at the Secretariat of the City of Sawahlunto where the researchers work everyday. Interviews were conducted in two stages, the first phase of interviews with five people PPK SKPD and second phase of interview with Head of BPKAD Kota Sawahlunto, Head of Treasury Section and Head of Verification and Management of Financial Section at BPKAD Kota Sawahlunto. The collected data was analyzed by qualitative analytical technique by reducing data, data presentation and verification. Data analysis is done by comparing the implementation of verification function with The Regulation of The Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006 and regional policy. The results showed that the implementation of the function verification of PPK SKPD on the accountability of the treasurer has not been fully implemented by PPP SKPD, such as: i) has not carried out the verification of the administrative accountability of the treasure the recipient and the treasure expense. ii). duplicate implementation of verification function with PPKD. iii) verification findings / recommendations are not documented and archived by PPK SKPD. Constraints in the implementation of the verification function, are: i) The Regulation of The Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006 and other regional policies do not provide clear and detailed guidance regarding the implementation of verification function on liabilities of the treasurer. ii) Lack of PPKD development related to the implementation of verification function, so PPK SKPD performs verification function based on experience.

Keywords : Regional Financial Management, Accountability, Verification Function.

